

PENGARUH *SIZE, WEALTH, LEVERAGE, DAN INTERGOVERNMENTAL REVENUE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

Rina Novia¹, Kartim²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua, Jayapura
rinanovia@gmail.com

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua, Jayapura
kartim321@gmail.com

ABSTRAK

Dengan adanya UU No. 32 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Pusat memiliki keterkaitan dalam hal keuangan dengan daerah, dalam hal pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan atau ditugaskan kepada daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut didukung oleh tanggung jawab terhadap pemerintah daerah yang cukup besar, yaitu salah satunya dapat dibuktikan dengan kinerja pemerintah daerah. Kinerja merupakan gambaran tentang pencapaian visi, misi, dan tujuan dari suatu organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh *Size, Wealth, Leverage, dan Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Papua. Hasil menunjukkan bahwa variabel *size* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, variabel *wealth* berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan variabel *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keywords: *Size, Wealth, Leverage, Intergovernmental Revenue*, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Good governance* merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah agar terselenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi menuntut adanya keterbukaan [1]. Dalam penelitiannya [1] menyatakan bahwa lahirnya otonomi ini merupakan perwujudan dari pergeseran sistem pemerintahan yaitu sistem sentralisasi menuju

sistem desentralisasi. Adanya penyelenggaraan desentralisasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah [2]. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya terkhusus dalam keuangannya dapat dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tercermin dalam pembiayaan pelaksanaan tugas pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBD ini kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas kepada publik [3]. Akuntabilitas bukan kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik sekedar dibelanjakan, namun harus dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Filosofi pengelolaan keuangan dalam pemerintahan adalah bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, bukan pegawai. Oleh karena itu, efektivitas keuangan harus jelas, yaitu untuk kemakmuran masyarakat. Wujudnya adalah daya beli masyarakat naik,

masyarakat banyak yang bekerja dan punya penghasilan, pelayanan yang baik dan murah, serta masyarakat yang terjamin kesehatannya [4].

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan [5]. Menurut [6], "Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah".

Pengukuran kinerja keuangan menurut [6] dapat diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain membandingkan, pengukuran kinerja juga dapat menggunakan enam rasio yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio*, dan rasio pertumbuhan.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah *Size*, *Wealth*, *Leverage*, dan *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengaruh *Size*, *Wealth*, *Leverage*, dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005, menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya bila ada, Laporan Keuangan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aset) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan SAP. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan.

Untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui

penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Bagi pihak eksternal, LKPD yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja (Surepno, 2013).

2.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Azhar (2008), menyatakan bahwa kinerja merupakan aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Hamzah (2007), menjelaskan bahwa kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi.

Pengukuran kinerja dinilai sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sesuatu yang memang penting untuk dilakukan. Pengukuran kinerja juga merupakan salah satu kunci sukses dari pembaruan dalam sektor publik (Greiling, 2015).

2.3. Size

Size (ukuran) yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012).

Proksi untuk menjelaskan *size* adalah jumlah dari total aset pemerintah daerah. Aset yang dimiliki dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar

diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah daerah dengan aset besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat.

2.4. Wealth

Wealth (kemakmuran) dari pemerintah daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (Abdullah, 2004). Undang-undang No. 33 Tahun 2004, menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digali untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Kemampuan suatu daerah menggali potensi Pendapatan Asli Daerahnya akan sangat mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.

2.5. Leverage

Menurut Kusumawardani (2012) *Leverage* adalah perbandingan antara utang dan modal. Semakin besar *leverage*, maka akan memperbesar tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut pada pihak luar, sehingga akan menunjukkan kinerja yang rendah. Sudarmadji dan Sularto (2007) mengungkapkan bahwa *leverage* adalah ukuran yang digunakan dalam mengetahui besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. *Leverage* menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah ke pihak luar, dalam hal ini adalah kreditur, bukan pemegang saham maupun investor. Namun di dalam pemerintah daerah *leverage* yang diterapkan posisinya tidak dapat disamakan dengan kondisi pada suatu unit usaha, karena pembiayaan eksternal pemerintah daerah tidak hanya melalui hutang tetapi juga berasal dari dana bantuan pemerintah pusat (dana perimbangan).

2.6. Intergovernmental Revenue

Intergovernmental revenue adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah, Nam (2001). *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan. Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.

Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah agar tidak ada suatu daerah yang tertinggal, serta meningkatkan kapasitas daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu suatu pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat di mana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiono, 2008).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *explanatory* yang berupa penjelasan dan pengujian hipotesis. Penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dan pengaruhnya dengan pengujian hipotesis (Sugiono, 2005).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2012-2016.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan dipilih untuk melakukan penelitian adalah Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Papua. Waktu penelitian akan direncanakan pada awal bulan Juli sampai dengan akhir bulan Agustus 2018.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2012-2016. Berdasarkan populasi yang ada, terdapat 1 kota dan 28 kabupaten di Provinsi Papua.

3.3.1. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap dapat mewakili dari keseluruhan populasi. Selanjutnya, sampel penelitian ini didasarkan pada metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang

representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Metode *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau disebut juga dengan penarikan sampel (Noch dan Husen, 2015).

Kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 3.3.1.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota mulai dari tahun 2012-2016 yang telah diaudit oleh BPK.
- 3.3.1.2. Memiliki data yang lengkap untuk pengukuran keseluruhan variabel dengan menyediakan data dua komponen laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Neraca.

Adapun besar sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purpose sampling* berjumlah 12 Kabupaten/Kota terbesar di Provinsi Papua. Nama-nama Kabupaten/Kota yang masuk dalam sampel peneliti dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Sampel Kabupaten / Kota

No	Nama Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Merauke
2	Kabupaten Asmat
3	Kabupaten Boven Digoel
4	Kabupaten Mappi
5	Kabupaten Mamberamo Raya
6	Kabupaten Mimika
7	Kabupaten Sarmi
8	Kabupaten Yahukimo
9	Kabupaten Peg. Bintang
10	Kabupaten Jayapura
11	Kabupaten Nabire
12	Kabupaten Waropen

Sumber: data diolah, 2018

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.4.1. Variabel *Independent* (X) penelitian ini adalah: *Size* (X_1), *Wealth* (X_2), *Leverage* (X_3), dan *Intergovernmental Revenue* (X_4).

3.4.2. Variabel *Dependent* (Y) yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Size dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) yaitu diproksikan dengan menggunakan total aset. *Wealth* dalam penelitian Sumarjo (2010) menggunakan Pendapatan Asli Daerah sebagai

proksi total pendapatan pemerintah dibagi dengan jumlah penduduk. Sesuai dengan Sumarjo (2010), dalam penelitian ini menggunakan proksi Pendapatan Asli Daerah dalam pengukuran kekayaan Pemerintah Daerah di Indonesia, PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari pemerintah itu sendiri (Suhardjanto, dkk, 2010).

Leverage merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang dari pihak eksternal dibandingkan dengan total aset. Semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin buruk kinerja. *Intergovernmental revenue* diukur dengan proksi yang sama dalam penelitian Sumarjo (2010). Pengukuran ini dipilih karena *intergovernmental revenue* merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari lingkungan eksternal (luar kota madya) dan besarnya ketergantungan pemerintah dari transfer pemerintah pusat (80%-98%) (Suhardjanto et al., 2010). Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Rukmana, 2013).

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dengan sumber data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (Noch dan Husen, 2015). Data sekunder ini terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, kemudian diolah guna menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data, peringkasan data, penyamplingan dan penyajian hasil peringkasan

tersebut. Statistik deskriptif akan digunakan untuk mendeskripsikan secara statistik variabel-variabel dalam penelitian ini. Untuk mengetahui deskripsi data diperuntukan ukuran yang lebih ringkas, yaitu ringkasan statistik. Ukuran yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah nilai minimum dan nilai maksimum, sum, *mean*, standar deviasi serta *variance*.

3.4. Uji Asumsi Klasik

3.4.1. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 24, normalitas dideteksi dengan alat analisis grafik berupa *PP Plot* dan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan melihat nilai signifikan residualnya. Jika nilai signifikan berada di atas nilai signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat normalitas.

3.4.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk meneliti apakah pada model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas terjadi ketika variabel independen yang ada dalam model berkorelasi satu sama lain, ketika korelasi antar variabel independen sangat tinggi maka sulit untuk memisahkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian terhadap multikolinearitas dideteksi menggunakan *tolerance value* dan *variance inflation factor (VIF)*, jika nilai *tolerance value* > 0.10 dan *VIF* < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas Ghozali (2005).

3.4.3. Uji Autokorelasi

Deteksi autokorelasi ini dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW). Tujuan pengujian ini adalah untuk meneliti apakah sebuah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode *t* dengan kesalahan pengganggu pada periode *t-1* (sebelumnya). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai DW Hitung dengan nilai *dl* (*lower bound*) dan *du* (*upperbound*) dari DW Tabel.

3.4.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka kondisi ini disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik

adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali (2005). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu *Y* adalah residual (*Yprediksi - Y* sesungguhnya) yang telah *di-studentized*. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu *Y*, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5. Uji Hipotesis

3.5.1. Metode analisis regresi linier berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk membuat model matematika yang dapat menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (*Y*). Model regresi linear berganda penelitian ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = *Size*

X_2 = *Wealth*

X_3 = *Leverage*

X_4 = *Intergovernmental Revenue*

ϵ = *Error Term*

3.5.2. Uji signifikan parsial (uji t)

Uji *t* (*t-test*) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Aplikasinya dilakukan dengan menguji satu per satu pengaruh dari masing-masing variabel independen. Langkah-langkah pengujian Ghozali (2005):

3.5.2.1. Merumuskan hipotesis $H_0: \beta_1 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. $H_a: \beta_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

- 3.5.2.2. Menentukan level signifikansi (α)
Tingkat signifikansi (significant level)
yang digunakan sebesar 5%.
- 3.5.2.3. Kriteria pengambilan keputusan
H0 diterima jika : $t_{hitung} > \alpha$
H0 ditolak jika : $t_{hitung} < \alpha$,

3.5.3. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

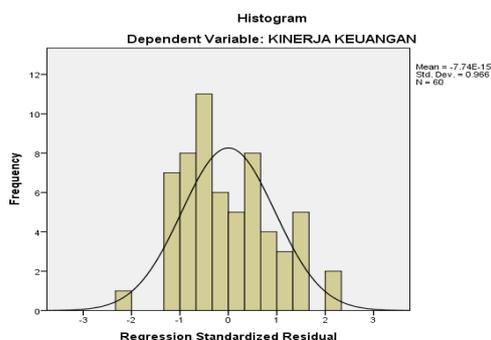
Uji hipotesis lain yang juga digunakan adalah dengan menggunakan uji F dengan tingkat signifikan 5%. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya adalah; jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh *Size, Wealth, Leverage* dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3.6. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

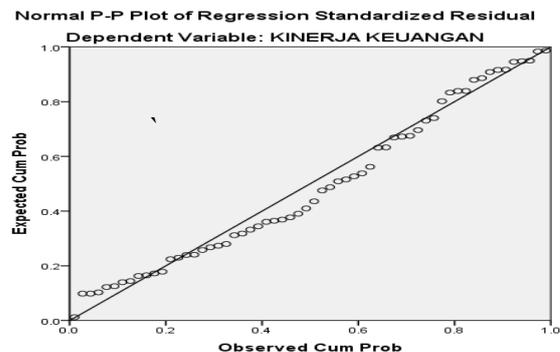
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Normalitas



Gambar 1. Histogram

Berdasarkan hasil output SPSS, tampilan histogram menunjukkan bahwa kurva dependen dan *regression standardized residual* membentuk gambar seperti lonceng. Sehingga data dalam penelitian ini berdistribusi normal.



Gambar 2. Normal Probability Plot

Output SPSS, menunjukkan bahwa *Normal P-P Plot Regression Standardized* memperlihatkan titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal. Oleh karena itu, berdasarkan uji normalitas analisis regresi dapat digunakan.

Tabel 3.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,12062501
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,097
	Negative	-,074
Test Statistic		,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Hasil

4.2. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.

Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
SIZE	.787	1.270
WEALTH	.698	1.432
LEVERAGE	.900	1.111
INTERGOVERNMENTAL	.821	1.218
REVENUE		

a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN

Data di atas menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) melebihi 0,10 yang berarti tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

4.3. Uji Autokorelasi

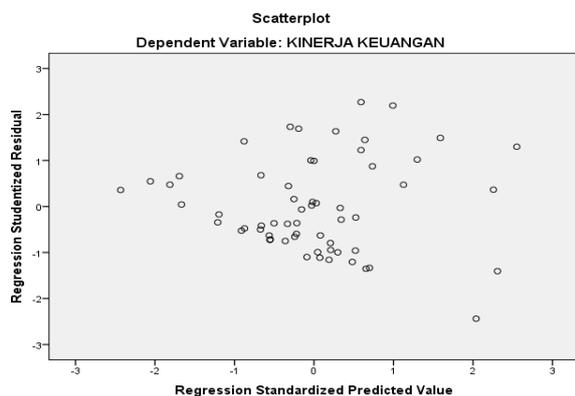
Tabel 5.
Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	,526 ^a	,276	,224	,12493	2,262

- a. Predictors: (Constant), INTERGOVERNMENTAL REVENUE, LEVERAGE, SIZE, WEALTH
b. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan Tabel 5 di atas diketahui nilai Durbin-Watson (d) sebesar 2,262., persamaan regresi tersebut tidak mengandung masalah autokorelasi.

4.4. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Grafik Plot

Berdasarkan uji heterokedastisitas pada model regresi yang terbentuk dinyatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

4.5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t hitung	Sig	Keterangan
Constant	4,617			
Size	-0,063	-1,210	0,231	Tidak Signifikan
Wealth	-0,126	-3,736	0,000	Signifikan
Leverage	-0,712	-1,052	0,297	Tidak Signifikan
Inter governmental Revenue	0,587	1,285	0,204	Tidak Signifikan
R Square	0,276			
Adjusted R Square	0,224			
Tabel	1,673			
Fhit	5,252			
Ftabel	2,54			

Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dari data di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 4,617 - 0,063X_1 - 0,126X_2 - 0,712X_3 + 0,587 + e$$

Keterangan:

- Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 α : Konstanta
 β : Koefisien Regresi
 X_1 : Size
 X_2 : Wealth
 X_3 : Leverage
 X_4 : Intergovernmental Revenue
 e : Error Term

4.6. Pengujian Hipotesis

4.6.1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (Uji t) pada tabel 6, maka pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

4.6.1.1. Variabel *Size* (X_1) telah didapat nilai t_{hitung} sebesar -1,210 dengan tingkat signifikansi 0,231, sementara nilai t_{tabel} sebesar 1,673. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi $0,231 > 0,05$. Hasil analisa tersebut bisa dikatakan H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya variabel *Size* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4.6.1.2. Variabel *Wealth* (X_2) telah didapat nilai t_{hitung} sebesar -3,736 dengan tingkat signifikansi 0,000, sementara nilai t_{tabel} sebesar 1,673. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil analisa tersebut bisa dikatakan H_0 ditolak dan H_2 diterima artinya variabel *Wealth* berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4.6.1.3. Variabel *Leverage* (X_3) telah didapat nilai t_{hitung} sebesar -1,052 dengan tingkat signifikansi 0,297, sementara nilai t_{tabel} sebesar 1,673. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi $0,297 > 0,05$. Hasil analisa tersebut bisa dikatakan H_0 diterima dan H_3 ditolak artinya variabel *Leverage* tidak

berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

- 4.6.1.4. Variabel *Intergovernmental Revenue* (X4) telah didapat nilai t_{hitung} sebesar 1,285 dengan tingkat signifikansi 0,204, sementara nilai t_{tabel} sebesar 1,673. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi $0,204 > 0,05$. Hasil analisa tersebut bisa dikatakan H_0 ditolak dan H_4 diterima artinya variabel *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4.6.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji statistik F)

Tabel 7
Hasil Uji Signifikansi Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,328	4	,082	5,252	,001 ^b
Residual	,858	55	,016		
Total	1,186	59			

a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN
b. Predictors: (Constant), INTERGOVERNMENTAL REVENUE, LEVERAGE, SIZE, WEALTH

Berdasarkan hasil uji signifikan simultan (uji F) diketahui bahwa F hitung sebesar 5,252. Sementara nilai F tabel sebesar 2,54 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($5,252 > 2,54$) dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hal tersebut membuktikan bahwa *Size*, *Wealth*, *Leverage*, dan *Intergovernmental Revenue* secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

4.6.3. Koefisien Determinasi

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa *Adjusted R Square* (R^2) adalah 0,224. Hal ini berarti 22,4% variasi dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari empat variabel independen, yaitu *Size*, *Wealth*, *Leverage* dan *Intergovernmental Revenue*. Sementara sisanya ($100\% - 22,4\% = 77,6\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam konseptual penelitian ini.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Hasil penelitian menunjukkan *Size* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- 5.1.2. Hasil penelitian menunjukkan *Wealth* berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- 5.1.3. Hasil penelitian menunjukkan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- 5.1.4. Hasil penelitian menunjukkan *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- 5.1.5. Hasil penelitian menunjukkan *Size*, *Wealth*, *Leverage* dan *Intergovernmental Revenue* secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

5.2. Saran

- 5.2.1. Pemerintah daerah dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangannya sampai semaksimal mungkin sehingga mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal.
- 5.2.2. Pemerintah daerah dapat mengelola APBD dengan bijak untuk menciptakan efisiensi anggaran.
 - a. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sumber pendapatan utama daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat .

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. dkk Prayitno, "Jurnal InFestasi," *Karakteristik, Pengaruh Daerah, Pemerintah Temuan, D A N Bpk, Audit Kinerja, Terhadap Pemerintahan, Penyelenggaraan*, vol. 11, no. 2, pp. 214–230, 2015.
- [2] R. A. Minarsih, "Pengaruh size, wealth, leverage dan intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di jawa tengah," 2015.
- [3] M. Y. Indrawan, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-provinsi Sulawesi Selatan.," 2013.
- [4] Jumali, "Pengelolaan Keuangan Daerah-Efektivitas Keuangan Harus

- Jelas.,” 2014.
- [5] A. Hamzah, “Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan : Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006,,” 2007.
- [6] M. . Halim, Abdul dan Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi ke4. Jakarta: Salemba Empat, 2012.